

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI  
PEREMPUAN DI DAERAH PESISIR  
DESA SENGA SELATAN  
KECAMATAN BELOPA  
KABUPATEN LUWU**



**Disusun Oleh:**

A. Saddakati

E 042 171 003

PPS

ANTROPOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN  
DI DAERAH PESISIR DESA SENG SELATAN  
KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI SADDAKATI**


E042171003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **20 AGUSTUS 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Munsi Lappe MA**  
Nip. 195612271980121001




**Dr. Safriadi, M.Si**  
Nip. 197406052008121001

Ketua Program Studi  
Antropologi



**Dr. Muhammad Basir MA**  
Nip. 196206241987021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si**  
Nip. 196511091991031008



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Saddakati  
NIM : E 042 171 003  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Antropologi  
Judul Penelitian : Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan di Daerah  
Pesisir Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa  
Kabupaten Luwu

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penciplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Makassar, 20 Agustus 2021

Peneliti Utama



A. Saddakati

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tesis dengan judul “Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu” dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki dalam bidang Ilmu Antropologi, khususnya dalam menganalisa proses pemberdayaan sosial ekonomi perempuan di daerah pesisir. Namun demikian dengan keterbatasan pengetahuan, penulis mencoba menuangkan ide-ide guna menyelesaikan tulisan yang sangat sederhana ini.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan moril dan materil dari berbagai pihak sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Bantuan berupa buku, dokumen, jurnal yang terkait, dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis dalam tesis ini. Demikian pula kesediaan dari teman-teman untuk berdiskusi berbagai dimensi, melalui pendekatan teori guna menyempurnakan tulisan ini, sehingga wajarlah pada tempatnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada DR. Muni Lampe selaku dosen Komisi Penasehat I, dan DR. Syafriadi selaku dosen Komisi Penasehat II yang banyak memberi dorongan dan semangat untuk selalu mempelajari Ilmu Antropologi secara teoritis agar memperoleh

kompetensi dibidang keilmuan sebagai bekal calon magister ilmu antropologi. Semoga apa yang telah diberikan selama ini mendapat berkah yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Dengan kerendahan hati, penulis meminta saran dan tanggapan ataupun kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca tesis ini, agar nantinya bisa diperbaiki demi kesempurnaan tulisan ini. Seperti pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak laut yang tak berombak”. Semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna bagi para pembacanya utamanya kepada diri penulis. Penulis berterima kasih dan menaruh rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin
2. Dirfektur Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan jajarannya
4. DR. M. Basir selaku ketua Program Study Pasca Sarjana Antropologi Universitas Hasanuddin
5. DR Munsil Lampe selaku dosen Komisi Penasehat I tesis, semoga Allah S.W.T. membalas kebaikan dan memberi keberkahan dalam usia beliau
6. DR. Syafriadi selaku dosen Komisi Penasehat II tesis salama'ki kurrusumange'ta
7. Prof DR Mahmud Tang selaku dosen penguji salama'ki kurrusumange'ta
8. Prof DR M. Yamin selaku dosen penguji salama'ki kurrusumange'ta

9. DR. M. Yahya selaku dosen penguji salama'ki kurrusumange'ta
10. Dan segenap dosen pasca Sarjana Ilmu Antropologi Universitas Hasanuddin
11. Pak Irman dan staf administrasi Pasca Sarjana Antropologi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis, salama'ki kurrusumange'ta
12. Dan tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman handai tolah yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salama'ki kurrusumange'ta.
13. Dan kepada keluarga kecil saya dirumah yang selalu memberi dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Lembaran kertas ini tidak cukup untuk menulis nama-nama setiap orang yang berjasa dalam kehidupan penulis. Sekecil apapun bantuan itu, penulis tetap mengenang dan insya Allah balasannya kalau tidak ditemukan di dunia maka mungkin Allah S.W.T akan membalasnya di dunia akhirat kelak. Amin.

Makassar, 20 Agustus 2021

A. Saddakati

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN DI  
DAERAH PESISIR DESA SENGA SELATAN  
KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU  
(A. Saddakati, mahasiswa PPS Antropologi Unhas)**

**Kata kunci : Pemberdayaan, perempuan, dan kemiskinan**

**ABSTRAK**

*A . SADDAKATI. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu (dibimbing oleh Dr. Mungsi Lampe dan Dr. Syafriadi).*

*Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi yang menunjang bagi implementasi program pemberdayaan perempuan, menguraikan model serta menggambarkan proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah, lembaga non pemerintah, dan pemberdayaan dari inisiatif masyarakat, serta menganalisa efektivitas program dalam peningkatan keberdayaan kaum perempuan di daerah pesisir.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informasi data dianalisis secara deskripsi dengan menggunakan tabulasi data.*

*Hasil peneliian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Sosial Kabupaten Luwu kurang berhasil sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang. Ketidakberhasilan program ini lebih disebabkan karena program tersebut kurang memperhatikan kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat, serta dilakukan tidak secara matang. Justru program pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga non pemerintah dianggap lebih berhasil. Agar kedepan program ini bisa berhasil maka terlebih dahulu masyarakat dibekali dengan pelatihan mengenai jenis usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.*

## **ABSTRACT**

*A . Saddakati. Women's Socio-Economic Empowerment of the Coastal Areas in Senga Selatan village, Belopa District, Luwu Regency, (guided by Dr. Munsil Lampe and Dr. Syafriadi).*

*Research purpose and significance is identify the supporting potential for the implementation of women's empowerment programs, describe model and process of women's empowerment handled by the government, non-government institutions, and community initiatives, and also analyze the program effectiveness that increasing the women empowerment in coastal areas.*

*research carried out in South Senga village, at Belopa District of Luwu Regency. Data collection using qualitative methods through in-depth interviewing techniques, observation, and documentation. Data analysis techniques using descriptive analysis.*

*The research results showed that the empowerment program handled by the central government through the Luwu Regency Social Service was unsuccessful therefore a review is needed. The program failure is caused program paid less attention to the geographical and cultural conditions of the local community, and was poorly planned. It is precisely the empowerment program carried out by a non-governmental organization which is considered more successful. So for future success, it is necessary to equip the community with the types of businesses that will be developed in accordance with the interests and needs of the community itself.*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul .....	I
Halaman Pengesahan .....	II
Pernyataan Keaslian Tesis.....	III
Kata Pengantar .....	IV
Abstrak.....	VII
Daftar Isi .....	VIII
Daftar Gambar .....	X
Daftar Tabel .....	XI
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perempuan dalam Perspektif Budaya, Kesejahteraan Sosial, dan Kemiskinan.....	11
B. Pemberdayaan Sosial Perempuan .....	19
C. Beberapa Regulasi dalam Pemberdayaan Perempuan .....	26
D. Kajian Hasil Penelitian Sebelumnya .....	28
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Type Penelitian. ....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Jenis Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Metode Analisa Data.....	42
G. Etika Penelitian .....	43

## **BAB IV GAMBARAN UMUM DESA SENGA SELATAN**

A. Sejarah Lokasi.....	45
B. Keadaan Geografi dan Demografi.....	48
C. Fungsi Sistem Keperawatan dalam Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi .....	53
D. Sistem Pelapisan Sosial : kasta dan Kelas .....	56
E. Mata Pencaharian dan Aktivitas Ekonomi.....	60
F. Sarana dan Prasarana.....	62

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Potensi dan Masalah yang Menunjang dan Menghambat Program Pemberdayaan .....	65
B. Program Kegiatan dan Model Pemberdayaan Perempuan .....	98
1. Struktur Organisasi dan Jenis-Jenis Kelompok Usaha .....	98
a. Kelompok Usaha Bersa (KUBE).....	100
b. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) .....	117
c. Program Keluarga Harapan (PKH).....	127
d. UEP - SPP dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK).....	133
e. Usaha Budidaya Rumput Laut ( <i>Eucheuma Cottonii</i> ) dan Kesempatan Kerja .....	142
2. Jenis-Jenis Usaha Terpilih Dari Setiap Tipe Program Besar .....	153
C. Penerapan Hasil Pemberdayaan Perempuan oleh Kelompok Usaha.....	158
1. Aspek Keberdayaan Pengelolaan Usaha .....	158
2. Pengaruh Budaya Dalam Pengelolaan Usaha.....	183

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	186
B. Saran .....	187
DAFTAR PUSTAKA .....	189
LAMPIRAN.....	192

## DAFTAR GAMBAR

### Hal

1. Gambar 1 : Peta Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.....	49
2. Gambar 2 : Jembatan pelangi .....	67
3. Gambar 3 : Pesta laut di Senga Selatan 2019.....	71
4. Gambar 4 : Kadaan musim .....	75
5. Gambar 5 : Rumah Pak Supardi.....	83
6. Gambar 6 : Pemukiman orang Bajo.....	84
7. Gambar 7 : Struktur Organisasi Tim Pelaksana .....	100
8. Gambar 8 : Struktur Organisasi KUBE.....	102
9. Gambar 9 : Struktur organisasi UPK Kec. Belopa.....	138
10. Gambar 10: Ibu-Ibu di Senga Selatan sedang mengikat Bibit rumput laut. ....	147
11. Gambar 11: Pembuatan keramba apung 2019. ....	148
12. Gambar 12 : Hasil produksi tepung sagu Ibu Sarkial Di Desa Cimpu Utara.....	163
13. Gambar 13 : IKM Barambing Kabupaten Luwu.....	165

## DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1 : Penelitian terdahulu dari sudut persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. ....	32
2. Tabel 2 : Data penduduk Desa Senga Selatan 2018-2019. ....	53
3. Tabel 3 : Tingkat Pendidikan angkatan kerja.....	77
4. Tabel 4 : Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk miskin di Kabupaten Luwu. ....	80
5. Tabel 5 : Data penduduk miskin di Kabupaten Luwu Berdasarkan BDT .....	82
6. Tabel 6 : Masalah dalam penelitian. ....	97
7. Tabel 7 : Tahapan KUBE – PKH.....	107
8. Tabel 8 : Daftar penerima KUBE Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2012-2019 dari APBN.....	114
9. Tabel 9 : Perbedaan KUBE dan UEP.....	126
10. Tabel 10: Rumah tangga miskin penerima PKH Di Senga Selatan 2019 .....	128
11. Tabel 11: Dana bergulir UPK Kec. Belppa 2019.....	139
12. Tabel 12: Penerima mamfaat UPK 2019.....	140
13. Tabel 13: Tunggakan dana bergulir UPK Kecamatan Belopa 01 Januari 2019. ....	141
14. Tabel 14: Perbedaan bantuan KUBE/UEP dari pemerintah dan UEP dari UPK. ....	154
15. Tabel 15: Data Kube yang dianggap berhasil oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2019. ....	169

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang**

Kehidupan kaum perempuan Indonesia masih dalam kondisi memprihatinkan. Mereka banyak mengalami perlakuan diskriminasi dan menempatkan kaum perempuan pada posisi termarjinalkan, tidak berdaya secara sosial, ekonomi dan politik. Perempuan Indonesia, masih dalam belenggu kebiasaan tradisi lama (old tradisi), yang selalu memposisikan kaum perempuan pada wilayah domestik. Tinggal di rumah, memasak dan menyiapkan makanan, mencuci piring, melahirkan dan memelihara anak. Sepertinya tugas-tugas domestik rumah tangga dianggap sebagai tugas kaum perempuan yang suci dan abadi yang tidak dapat dipertukarkan kepada kaum laki-laki.

Menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin, perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara perempuan dan laki-laki memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, laki-laki membuahi. Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan bersifat kodrati yang tidak mungkin dapat dirubah dan dipertukarkan.

Di Sulawesi Selatan khusus wilayah penyebaran suku Bugis dan Makassar, kebiasaan masa lalu ini sedikit berbeda dengan kebiasaan masa lalu pada umumnya yang berlaku di Indonesia. Di Sulawesi Selatan masyarakat menganut sistim kekerabatan bilateral atau cognatic (Pelras, 2006, 176), yang memberi penghormatan dan penghargaan sederajat antara perempuan dan laki-

laki. Peran domestik rumah tangga sepenuhnya dikuasai oleh kaum perempuan, akan tetapi peran di ruang publik juga terbuka lebar kesempatan bagi kaum perempuan untuk beraktifitas dan menjalankan fungsi sosial, ekonomi dan politik.

Di Kabupaten Luwu, seperti halnya orang Bugis lainnya yang menganut sistim bilateral, posisi kaum perempuan di dalam masyarakat sangat dihormati. Meskipun bekerja pada ruang publik akan tetapi biasanya mereka diberi pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan tenaganya, seperti penjaga toko, tukang masak di warung, tukang jahit pakaian atau menjual sayur dan ikan di pasar, dan tidak pernah kita jumpai seorang perempuan bekerja kasar sebagai tukang batu, pekerja jembatan dan bekerja membajak sawah.

Pekerjaan perempuan lebih bersifat ekofeminisme. Ketergantungan kaum perempuan ditujukan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Perempuan adalah penjaga dan pemelihara alam, perempuan adalah anti pengrusakan alam. Rusaknya alam bisa berdampak terhadap proses pemiskinan dan penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan. Secara teknis ekofeminisme dipergunakan oleh para ilmuwan sosial untuk memahami fenomena terpuruknya kehidupan perempuan akibat perlakuan yang bersifat destruktif terhadap alam, seperti pengrusakan terumbu karang sebagai akibat dari penggunaan bom ikan dan potas, pembalakan hutan, dan pertambangan. Teori ekofeminisme ini dicetuskan oleh ilmuwan sosial dari India bernama Vandana Shiva.

Kaum perempuan yang berada di pesisir pantai Desa Senga Selatan, tidak pernah kita menjumpai mereka pergi kelaut mencari ikan atau pergi ke empang menggali tanah. Yang nampak pada aktifitas mereka sehari-hari adalah bahwa

hasil dari tangkapan ikan tersebut mereka proses untuk selanjutnya dijual ke pasar. Menjual hasil laut di pasar seperti, ikan, kerang-kerang, udang, kepiting dilakukan oleh pada umumnya kaum perempuan.

Sangat disayangkan bila seorang laki-laki atau suami membatasi ruang gerak kaum perempuan untuk bekerja di ruang publik. Bagi kaum perempuan, memilih sebuah pekerjaan merupakan sebuah kesepakatan. Kalau seorang laki-laki atau suami menghendaki istrinya untuk tinggal dirumah setiap hari mengurus rumah tangga dan mempersiapkan segala kebutuhan laki-laki atau suami, atau anak maka resikonya seorang laki-laki atau suami harus menyerahkan segala penghasilan yang diperoleh setiap hari kepada istrinya. Kaum perempuan bertindak sebagai penyimpang kas rumah tangga. Yang paling tidak disenangi oleh seorang perempuan atau istri adalah bila melihat laki-laki atau suami setiap pulang bekerja tidak pernah menyetor penghasilannya kepada sang istri. Hal tersebut dianggap sebagai pola perilaku yang menyimpang dari tradisi yang berlaku pada sebuah rumah tangga. Perilaku laki-laki atau suami semacam ini sangat dibenci oleh kaum perempuan.

Dalam sebuah hubungan sosial sering dijumpai seorang perempuan memperonifikasikan perilaku seorang laki-laki dengan simbol-simbol yang terdapat disekitar mereka, atau dilihat dan dipakai sehari-hari dalam rumah tangga. Perempuan sering mengeluarkan sebuah kalimat yang berkonotasi negatif kepada seorang laki-laki atau suami, misalnya laki-laki atau suami disebut “*ambe’ mare’* “ , biasa juga disebut “*tappi sandu*“ atau juga disebut “*paru’ gallang*”. “*Ambe’ mare’* ” terdiri dari dua kata yaitu “*Ambe*” artinya bapak dan “*Mare’* “, artinya suka campur tangan. Jadi *ambe mare’* adalah sebutan bagi

seorang laki-laki atau suami yang suka mencampuri urusan pekerjaan perempuan di dapur, seperti selalu membuka tempat beras, memeriksa lauk pauk yang akan dimasak.

“*Tappi sandu*” terdiri dari dua kata yaitu *tappi* = semacam keris atau badik yang disimpan di pinggang seorang laki-laki, sedangkan *sandu* adalah sebuah sendok nasi terbuat dari bahan kayu. Secara bebas “*tappi sandu*” adalah tipe perilaku seorang laki-laki atau suami yang semua penghasilannya disimpan sendiri. *Tappi sandu* adalah sebutan bagi seorang suami yang tidak mau menyerahkan penghasilkannya kepada istri. Uang baru bisa keluar dari saku bajunya kalau istrinya meminta untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Misalnya mau ke pasar beli ikan atau mau beli sabun untuk cuci piring. Suami mencari uang dan sekaligus bertindak sebagai pemegang kas rumah tangga.

“*Paru' gallang*” terdiri dari dua kata *paru* dan *gallang*. “*Paru*” adalah sebuah benda yang digunakan untuk memproses kelapa menjadi halus untuk dibuat santan, sedangkan “*gallang*” adalah kuningan yang padat dan keras. Jadi *paru gallang* adalah sebuah pekerjaan memarut kuningan (*gallang*) yang tidak gampang haus (terkikis) walaupun digosok berkali-kali. “*Paru gallang*” secara bebas adalah seorang laki-laki atau suami yang berperilaku sangat kikir, tidak mudah mengeluarkan uang dari hasil keringatnya. Misalnya kalau istri minta uang untuk beli ikan dan sayur sebanyak seratus ribu rupiah, tapi sang suami hanya memberikan separuhnya dengan berbagai alasan.

Tiga sebutan berkonotasi negatif yang ditujukan kepada laki-laki atau suami seperti tersebut di atas merupakan sebuah kritik seorang perempuan



terhadap kaum laki-laki yang berperilaku menyimpang dari kesepakatan. Kadang tiga perilaku tersebut di atas dimiliki secara bersamaan oleh seorang laki-laki. Perilaku menyimpang tersebut sering kali dianggap sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga dan tidak jarang berujung menjadi perceraian.

Di Desa Senga Selatan, kegiatan budidaya rumput laut merupakan usaha ekonomi rumah tangga yang paling banyak menyerap tenaga kerja perempuan, utamanya pada pekerjaan mengikat bibit rumput laut. Pekerjaan ini dikerjakan oleh kaum perempuan dari berbagai tingkatan umur, mulai dari umur 7 tahun (anak sekolah) sampai perempuan berumur 70 tahun (Manula). Bagi anak sekolah tentu tidak bekerja sepenuh waktu, ada waktu-waktu tertentu mereka membantu orang tuanya bekerja sebagai pengikat bibit rumput laut, seperti ketika mereka sudah pulang sekolah atau pada hari libur.

Perempuan di daerah pesisir Desa Senga Selatan pada umumnya tinggal serumah dengan keluarga dekatnya, ada juga yang tinggal sendirian dirumah karena ditinggal mati oleh suami sementara anak mereka sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri. Meskipun demikian, mereka selalu ingin bekerja dan tidak mau tergantung dan menjadi beban hidup orang lain. Pekerjaan yang mereka lakukan bervariasi, akan tetapi pada umumnya mereka terlibat pada pekerjaan mengikat bibit rumput laut. Tercatat ada 140 (seratus empat belas) perempuan terlibat dalam pekerjaan tersebut. Pekerjaan mengikat bibit rumput laut semuanya dikerjakan oleh kaum perempuan dan tersebar luas di daerah pesisir.

Pada umumnya Perempuan di daerah pesisir Desa Senga Selatan memiliki semangat kerja yang tinggi. Karakter semangat kerja yang tinggi mereka sebut "*pakkareso*" atau perempuan yang suka bekerja keras. Istilah perempuan

“pakkareso” biasa diikuti dengan istilah “*tinulu*” atau ulet dalam bekerja. Semangat hidup yang tinggi, senang hidup mandiri dan merasa malu kalau tidak bekerja.

Masalah utama yang dialami oleh rumah tangga nelayan di daerah pesisir adalah kemiskinan. Pada umumnya mereka menghendaki ada perbaikan ekonomi berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi, diharapkan betul-betul dapat mengangkat harkat dan martabat anggota masyarakat di daerah pesisir yang masih dianggap kurang sejahtera.

Hampir rata – rata masyarakat yang menetap di daerah pesisir di seluruh nusantara ini mengalami kondisi yang sama. Kemiskinan sebenarnya hanyalah akibat, faktor penyebabnya bermacam-macam, bisa disebabkan karena (1) kerusakan alam seperti rusaknya terumbu karang, (2) tingkat pendidikan rendah, (3) pola hidup konsumtif/boros, (4) infrastruktur kurang berkembang, (5) kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada kondisi local masyarakat.

Didalam kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota, banyak dijumpai kehidupan ekonomi Perempuan sangat memprihatinkan. Mereka hidup dan tergantung dari uluran tangan orang lain,, tetangga bahkan menjadi pengemis dan peminta-minta dijalan demi untuk mendapatkan sesuap nasi dalam mempertahankan hidupnya, bahkan karena desakan kebutuhan hidup, ada diantara mereka terpaksa berurusan dengan penegak hukum.

Oleh sebab itu maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang dianggap telah mapan secara ekonomi diharapkan hadir dan turut serta berperan aktif membantu program Pemerintah dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang

dialami kaum Perempuan di daerah pesisir. Peran yang dimainkan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat tidak harus memberi bantuan secara tunai langsung, akan tetapi bisa juga dengan cara memberikan mereka sebuah pekerjaan yang layak secara rutin berkesinambungan setiap hari. Dengan demikian perempuan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa merasa aman dan terlindungi.

Walaupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana amanah UUD 45 bahwa :

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum....”, kemudian dipertegas dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, akan tetapi negara dalam hal ini diwakili Pemerintah terkadang belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan kehidupan yang dialami seluruh kelompok masyarakat utamanya Perempuan di daerah pesisir. Model pemberdayaan dalam bentuk kebijakan jaring pengaman sosial oleh pemerintah Pusat dan Daerah berupa jaminan sosial dan bantuan sosial seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP), atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan titik sasaran adalah keluarga miskin, dianggap belum mampu sepenuhnya menjawab ketidakberdayaan perempuan di daerah pesisir.

Upaya-upaya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan juga dilakukan berbagai pihak yang terorganisir, sebagaimana yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) yang merupakan kegiatan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan program Simpan

Pinjam Perempuan (SPP). Program tersebut didanai oleh Bank Dunia (World Bank) kemudian program tersebut dilanjutkan oleh Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank). Kegiatan simpan pinjam ini juga banyak dijumpai pada berbagai organisasi perempuan seperti pada organisasi struktur Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasa Wisma dan juga pada organisasi wanita yang lain.

Hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Perdesaan telah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan telah banyak menciptakan atau meningkatkan keberdayaan kaum perempuan rumah tangga kurang sejahtera dalam membangun ekonomi keluarga. Implementasi kebijakan/program tersebut telah memungkinkan kaum perempuan rumah tangga kurang sejahtera dapat melakukan kegiatan usaha produktif yang dapat memberi penghasilan guna menambah penghasilan keluarga.

Bahwa Disamping masalah kemiskinan, pandangan sebahagian orang memposisikan kaum perempuan sebagai kaum yang lemah dan tidak cocok bekerja diruang-ruang publik, hanya bisa mengurus rumah tangga. Ketidakberdayaan kaum perempuan di Kabupaten Luwu sangat dipengaruhi oleh beberapa masalah masalah di atas yaitu kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi alam yang sudah mulai rusak, pola hidup boros, infrastruktur kurang berkembang, kebijakan yang kurang memihak kepada masyarakat, dan pandangan tradisi lama, serta potensi yang dapat mendukung proses pemberdayaan perempuan seperti angkatan kerja cukup banyak utamanya pekerja perempuan, dan pengembangan areal wisata laut, semua itu mendorong penulis

mengangkat sebuah tesis yang berjudul “Pemberdayaan Sosial – ekonomi Perempuan di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu”.

## **B . Masalah Penelitian**

Ada dua masalah yang menjadi isu utama bagi kaum perempuan di daerah pesisir, yaitu masalah (1) pemahaman tradisi lama (old tradisi) dan (2) masalah kemiskinan. Dua isu utama ini kelihatan berada pada segmen berbeda, akan tetapi kelihatan bahwa keduanya memiliki korelasi yang kuat. Pemahaman tradisi lama yang menggambarkan secara simbolik perempuan berada pada ruang domestik sedangkan laki-laki berada pada ruang publik sedikit mengganggu dan membatasi ruang gerak kaum perempuan untuk mencari tambahan nafkah untuk tambahan ekonomi keluarga.

Sebenarnya tradisi lama dan kemiskinan dapat saja diatasi melalui program pemberdayaan perempuan. (1) Melalui sistem pendidikan berjenjang sedikit banyak akan meluruskan kembali pandangan tentang tradisi lama. Sementara (2) potensi hasil laut bila dikelola dengan baik, serta dikembangkan secara sungguh-sungguh akan dapat meningkatkan sumber pendapatan ekonomi perempuan di daerah pesisir. (3) Daerah pesisir pantai dapat saja dikembangkan menjadi areal wisata bahari yang dapat mendapatkan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Penulis beranggapan bahwa rumusan masalah tersebut di atas dapat saja diselesaikan melalui berbagai program pemberdayaan sosial – ekonomi oleh pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat itu sendiri.

Pertanyaan kunci dari penelitian ini adalah :

1. Masalah-masalah dan potensi apa yang menjadi alasan pentingnya dilakukan program pemberdayaan perempuan ?
2. Bagaimana model dan proses pemberdayaan perempuan di daerah pesisir Kabupaten Luwu ?
3. Bagaimana penerapan dan model pemberdayaan program tersebut terhadap peningkatan keberdayaan yang bersangkutan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi masalah dan potensi yang menunjang bagi implementasi program pemberdayaan perempuan yang telah dan sedang berlangsung.
2. Menyusun/mengontstruksi model dan menggambarkan proses pemberdayaan perempuan.
3. Menganalisa penerapan dan model pemberdayaan dalam peningkatan keberdayaan kaum perempuan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangsih informasi dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bidang Antropologi termasuk informasi tentang kaum perempuan di daerah pesisir di Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A . Perempuan dalam Perspektif Budaya, Kesejahteraan Sosial, dan Kemiskinan**

##### **1). Perempuan dalam Perspektif Budaya.**

Kebudayaan yang dianut setiap kelompok masyarakat turut berpengaruh terhadap eksistensi peran dan fungsi kaum perempuan di masyarakat, serta berpengaruh pula terhadap posisi maupun dalam hal berperilaku sosial sehari-hari. Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda dengan daerah yang satu dengan lainnya. Semua kebudayaan yang dianut setiap suku bangsa diyakini kebenarannya, dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proses berinteraksi sosial. Perempuan di Kabupaten Luwu dapat dijelaskan melalui prinsip bilateral dan struktur hierarchial keturunan (Anthon Andi Pangerang 2019 : 26). Berdasarkan mythologi tentang nenek moyang orang Luwu, awalnya hanya dua jenis manusia, mereka yang “berdarah putih” yang keturunan Dewata, serta mereka yang “berdarah merah” yang tergolong orang biasa, rakyat jelata atau budak (Pelras, 2006 :192). Pembagian kedua kategori tersebut bersifat mutlak dan tidak boleh saling dicampurkan. Dalam praktek perkawinan kedua kategori tersebut tidak hanya dibolehkan akan tetapi juga sering terjadi, sehingga mengangkat derajat lapisan menengah yang berada diantara kaum bangsawan tinggi dengan budak terendah.

Menurut anggapan orang Luwu yang bersumber dari mythologinya bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit kemudian turun ke bumi dan menjelma menjadi manusi. Mereka beranggapan bahwa tidak ada Tuhan jika tidak ada manusia untuk menyembahnya. Batara Guru harus menjalani sejumlah ritual desakralisasi, termasuk upacara mandi untuk merubah aroma dewata menjadi bau tubuh manusia (Pelras, Manusia Bugis, 2006 : 193). Walaupun demikian, Batara Guru masih tetap dianggap berdarah putih. Untuk mempertahankan kemurnian darahnya maka dicarilah pasangan hidupnya di dunia bawah “Toddang Toja” bernama We Nyilik Timo’ yang juga sepupu satu kalinya, karena di bumi belum ada orang berdarah putih. Perkawinan antara Batara Guru dari dunia atas (langit) dengan We Nyilik Timo dari dunia bawah (toddang toja) merupakan perkawinan setara, yang diharap kemudian hari melanjutkan trah kekuasaan di bumi (dunia tengah).

Mungkin karena anggapan tradisi lama diatas bahwa perempuan juga memiliki kelebihan-kelebihan yang setara dengan kaum laki-laki dalam berbagai hal termasuk memimpin, berkuasa sehingga dalam perjalanan sejarah di tanah Luwu ada beberapa kaum perempuan menduduki posisi puncak kekuasaan, menjadi politisi, birokrat, pengusaha dan berbagai peran dan posisi penting lainnya. Bahkan lebih jauh Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai “sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi social (social konstruktion) dan konstruksi budaya (cultural konstruktion). Seperti anggapan, bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah sifat yang tidak



permanen dan bisa diperuntukkan atau sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan, (Ahmad Suaedy, ed, 2000, 76).

Disamping sistim kekerabatan bersifat bilateral, masyarakat Luwu juga menganut pola interaksi sosial sangat terbuka. Seperti yang diceritakan oleh H. Ukkas Daeng Matteredu bahwa “Apabila ada seseorang yang karena melakukan kesalahan sehingga dikejar untuk dibunuh, orang tersebut walaupun belum sampai pada sebuah daerah tertentu hanya melemparkan topi yang digunakan kedalam sebuah wilayah adat tersebut maka wajib bagi pimpinan adat setempat untuk melindunginya”. Hal ini berlaku juga bagi seorang pendatang dari daerah lain yang walaupun hanya satu hari tinggal di wilayah Luwu, orang tersebut dianggap sebagai orang Luwu (Anthon Andi Pangerang 2019 : 26). Pola interaksi sosial yang sangat terbuka ini dapat kita lihat pada proses pemilihan Bupati Luwu Utara yang lalu, dimana Ibu Indah yang perempuan berdasarkan silsilahnya berasal dari daerah lain berhasil terpilih dengan perolehan suara terbanyak mengalahkan saingannya yang petahana dan silsilah keturunannya asli dari Luwu Utara.

Pola keterbukaan dalam dunia politik juga sangat dijunjung tinggi sampai sekarang masih terwariskan dalam kehidupan sosial masyarakat Luwu. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan orang Luwu seperti yang diuraikan Anton Andi Pangerang ( 2019 : 30) :

Luka taro Datu tellkuka taro Ade”

Luka taro Ade” telluka taro Anang

Luka taro Anang telluka taro To Maega, artinya :

Batal keputusan Datu bila bertentangan dengan keputusan Adat

Batal keputusan Adat bila bertentangan dengan keputusan Tokoh masyarakat

Batal keputusan tokoh masyarakat bila bertentangan dengan keputusan orang banyak.

Ungkapan tersebut di atas menggambarkan bahwa walaupun sistim pemerintahan di Luwu berdasarkan sistim kerajaan, akan tetapi nilai-nilai demokrasi berpengaruh terhadap norma-norma begitu pula penerapannya tetap ditunjung tinggi. Sangat terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan keinginannya kepada sang penguasa.

Bila dilihat uraian beberapa perempuan diatas yang pernah berpengaruh dan berkuasa di Tana Luwu dari masa lampau {sistim Keadatuan/Kerajaan} sampai sekarang dimana rata-rata mereka masih memiliki hubungan kekerabatan diluar Luwu. Andi Tenri Padang Opu Datu {Datu Luwu ke 38} adalah anak dari Andi Mappanyukki Raja Bone. Demikian pula dengan Batari Toja, Tenrileleang, Ibu Indah {Bupati Luwu Utara}. Maka menurut analisa penulis bahwa sistim kekerabatan yang meluas ditambah dengan pola keterbukaan sebagai bahagian dari kesedian menerima persamaan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pusran kekuasaan politik serta sifat keterbukaan menerima orang lain menjadi bahagian dari sistim kekerabatan, bukanlah menjadi sebuah hal tabu bagi masyarakat Luwu.

Dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan secara langsung oleh masyarakat, maka di Kabupaten Luwu Utara telah mencatat sejarah baru dalam pemilihan tersebut, yaitu ketika terpilihnya Ibu Indah sebagai perempuan pertama menjadi Bupati yang dipilih secara langsung.

Semua contoh diatas memberi gambaran bahwa di Luwu, pola keterbukaan untuk menerima eksistensi kaum perempuan beraktifitas di ruang publik terbuka lebar serta diterima secara baik. Dengan demikian maka menurut anggapan orang Luwu yang bersumber dari mythologi mereka bahwa status perempuan dan laki-laki itu didalam masyarakat bersifat sederajat. Hubungan antara ayah dengan anak dan hubungan antara ibu dan anak sama nilainya. Hubungan ini dikenal dengan sistim bilateral kingship. Bagi masyarakat yang menganut sistim bilateral kingship, tidak mengenal adanya marga, seperti pada masyarakat yang menganut sistim linier (baik patrilinear maupun matrilinear) misalnya pada masyarakat Batak yang bersifat patrilinear, kita mengenal adanya sistim Dalihan Natolu. Berdasarkan hubungan Holu dan Boru di masyarakat Batak setiap orang hanya memiliki satu marga (Anthon Andi Pangerang 2019 : 26).

## **2). Perempuan dan kesejahteraan sosial**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya ( UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial ). Sedangkan kesejahteraan itu sendiri adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi

manusia sesuai dengan Pancasila (UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Beberapa definisi yang terkait dengan kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial akan diuraikan pada bagian berikut. Kesejahteraan selalu diikuti dengan kata prasejahtera, belum sejahtera, atau miskin. Definisi pengertian sejahtera dan prasejahtera setiap orang atau lembaga berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan indikator yang digunakan. Maka tidak mengherankan bila informasi data mengenai prasejahtera atau orang miskin di setiap lembaga selalu berbeda. Sebagai contoh Kantor Badan Pusat Statistik di Kabupaten Luwu mengeluarkan data tentang prasejahtera dengan kecenderungan mengalami penurunan setiap tahun, hal ini karena didasarkan pada kondisi rata-rata pengeluaran perkapita penduduk setiap tahun. Sementara Dinas Sosial Kabupaten Luwu mengeluarkan data tentang prasejahtera dengan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini juga didasarkan pada kriteria tersendiri dengan melihat fakta-fakta di lapangan seperti bangunan rumah, sarana lingkungan, kesempatan mengikuti pendidikan, kemudahan untuk berobat ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat, ketersediaan fasilitas listrik dan air bersih.

### **3). Perempuan dan kemiskinan**

Kemiskinan atau penulis lebih cenderung menyebutnya orang atau kelompok masyarakat yang “ belum sejahtera “ merupakan problematika yang telah melanda dunia yang hingga kini masih menjadi isu sentral. Selain bersifat laten dan aktual. Kemiskinan adalah penyakit sosial yang tidak hanya dialami oleh

negara berkembang utamanya di Asia Tenggara, melainkan juga negara maju seperti Inggris dan Amerika. Ketika muncul revolusi industri di Inggris, Kemiskinan banyak diceritakan. Munculnya kaum kapitalis menguasai sektor ekonomi yang oleh Karl Max (1847) disebutkan bahwa kemiskinan terjadi akibat eksploitasi kaum buruh yang dilakukan oleh kaum kapitalis (Kemiskinan Filsafat, Hasta Mitra 2007). Beberapa pendapat lain seperti T.R. Malthus (1834) bahwa kemiskinan terjadi karena ketidak seimbangan pertumbuhan jumlah penduduk jauh lebih cepat berdasarkan deret ukur jika dibanding dengan ketersediaan bahan makanan berdasarkan deret hitung.

Secara tradisional di Asia Tenggara, unit dasar dari komunitas pertanian desa adalah rumah tangga dimana perempuan berpartisipasi langsung. Unit rumah tangga pedesaan bertanggung jawab atas kegiatan produksi, konsumsi dan investasi dimana perempuan berperan penting pada keseluruhan aktivitas ekonomi tersebut, (Noelen Heyzer, *Working Women in South-East Asia*, 1986:12). Bahwa kondisi perempuan di Desa Senga Selatan yang terlibat pada aktivitas produksi rumput laut merupakan gambaran umum kondisi ekonomi masyarakat pertanian desa di hampir seluruh Asia Tenggara sesuai dengan pendapat Noelen Heyzer. Bahkan lebih jauh jika merujuk pendapat Noelen Heyzer, peran dan aktivitas ekonomi perempuan pada kenyataannya lebih besar dan signifikan dari sebatas partisipasi mereka pada aktivitas produksi rumput laut semata. Perempuan di Senga Selatan terlibat pula pada aspek aktivitas ekonomi konsumsi dan investasi.

Suparlan (2004 : 315) mengatakan bahwa kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibanding dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat

sekitarnya. Menurut BAPPENAS (2004) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Ada sebuah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menarik sebuah gambaran kemiskinan ditunjukkan oleh R.H. Tawney (dalam Scott , 1994 : 1) sebagai berikut :

“ Ada daerah – daerah dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya”.

Terdapat dua macam kategori orang yang belum sejahtera, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (Rosalia Indriyati Saptatiningsih dkk, Pemberdayaan perempuan Desa, Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 2015). Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar kelompok pendapatan, oleh karena selalu bersifat dinamis. Hakikat belum sejahtera (miskin) ini tidak dilihat dari indikator-indikator ekonomi, melainkan menyangkut aneka dimensi sosial.

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat kurang sejahtera (miskin) adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara

layak. Upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, tentu dengan dukungan dan difasilitasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, maupun pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, sehingga proses penanggulangan masyarakat kurang sejahtera menjadi suatu gerakan yang akan menjamin potensi kemandirian dan berkesinambungan guna meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih layak.

## **B . Pemberdayaan Sosial Perempuan**

Pemberdayaan berasal dari kata “ daya “ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jadi pemberdayaan berarti memberi daya atau kekuatan. Disini terjadi suatu proses ada yang diberi daya atau kekuatan dan ada yang memberi daya atau kekuatan. Dalam bahasa Inggris pemberdayaan itu dimaknai “empowerment” atau memberi kekuatan. Dengan demikian maka definisi Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ( UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial ).

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Di dalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain yang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan

mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari ketergantungan (independent).

Pemberdayaan sebagai sebuah proses tindakan nyata untuk merubah sesuatu yang lemah agar terhindar dari ketergantungan, melalui beberapa tahapan, baik knowledge, attitude, maupun practice menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar, dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna kata “memperoleh daya” atau kekuatan menunjuk pada sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta daya kepada pihak lain. Keadaan seperti ini akan tercipta apabila seseorang atau kelompok orang menyadari ketidakberdayaannya, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan berasal dari masyarakat, melainkan ada pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan atau kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya.

Lahir dan berkembangnya konsep empowerment memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep empowerment itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk empowerment, akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep empowerment tersebut tidak disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau



power, orang yang tidak berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan disini berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk meningkatkan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan deversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riilnya baik kebutuhan praktis seperti menyiapkan lokasi dan bangunan sbagai tempat jualan, maupun kebutuhan strategis seperti penyediaan barang-barang yang banyak dibutuhkan rumah tangga, sekaligus permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi menemukan permasalahan. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi dari solusi yang ditentukan.

Hasil penelitian Pusat Study Wanita UGM (PSW UGM) tahun 2006, merumuskan bahwa pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Oleh sebab itu salah satu rekomendasi penelitiannya menyebutkan perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ( Tim PSW UGM, 2006 : 70).

Menarik konstruksi mengenai gender yang diungkapkan pada sebuah esai yang ditulis oleh Sherry Ortner (dalam Henrietta L. Moore, 1998 : 29) yang mempertanyakan “Apakah hubungan wanita dengan pria sama seperti hubungan alam dengan kebudayaan ?” Lantas dia menanyakan sebagai berikut :

“Banyak kreativitas dalam antropologi berangkat dari ketegangan antara dua rangkaian tuntutan , yaitu bahwa kita menjelaskan bentuk keuniversalan manusia, dan bahwa kita menjelaskan kekhususan budaya. Dengan prinsip inilah wanita memberikan kepada kita suatu permasalahan yang lebih menantang untuk dipecahkan. Status sekunder wanita dalam masyarakat merupakan suatu yang memang benar bersifat universal dan merupakan fakta di semua budaya. Meskipun merupakan fakta yang universal, konsepsi dan simbol budaya tertentu mengenai wanita merupakan hal yang sangat beragam dan bahkan saling bertolak belakang. Selanjutnya, perlakuan nyata terhadap wanita dan kekuasaan serta sumbangan yang diberikannya sangat bervariasi dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, dan beragam pada berbagai periode dalam sejarah tradisi kebudayaan tertentu. Kedua pokok ini – baik fakta universal maupun variasi kebudayaan – mengandung permasalahan yang membutuhkan penjelasan”.

Esei ini memprakarsai kerangka kerja yang kuat dan berpengaruh dalam mempelajari permasalahan sub ordinasi wanita melalui analisa simbolisme gender. Sub ordinasi wanita merupakan sesuatu yang bersifat universal, dan karena keadaan ini bukan sesuatu yang terbawa (inherent) dalam perbedaan biologis di antara kedua jenis kelamin tersebut, maka satu penjelasan alternatif haruslah ditemukan. Dimulai dari gagasan bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita hanya berarti (signifikan) dalam sistim nilai yang diberi makna

tertentu secara kultural (Henrietta, 1998. 30). Pertanyaan kemudian muncul, “Hal apakah yang sama dalam setiap kebudayaan sehingga setiap budaya menempatkan nilai yang lebih rendah terhadap kaum wanita?”. Bahwa wanita diberbagai kebudayaan dikaitkan dengan sesuatu yang dipandang rendah oleh setiap kebudayaan. Menurut Ortner hanya satu hal yang sesuai dengan penggambaran tersebut adalah “Alam”. Dalam pengertian yang paling umum, semua kebudayaan mengenal dan membuat perbedaan antara masyarakat manusia dengan alam dunia. Kebudayaan berusaha mengontrol dan menguasai alam, untuk memamfaatkannya demi kepentingan sendiri. Kebudayaan, karena lebih superior daripada alam dunia dan berusaha untuk mengatur dan mempertahankan hubungan antara masyarakat dengan kekuatan serta kondisi lingkungan. Wanita diidentifikasi atau secara simbolis diasosiasikan dengan “alam”, sedangkan pria diasosiasikan dengan “kebudayaan”. Oleh karena kebudayaan berusaha untuk mengontrol dan menguasai alam, maka merupakan sesuatu hal yang “alami” pula bahwa wanita, karena hubungannya yang dekat dengan alam, juga harus dikontrol dan dikuasai (Henrietta, 1998, 31).

Kebiasaan masa lalu yang dimotori oleh sistim kekerabatan patrilineal menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam perilaku sosial yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati mamfaat dari sumber daya dan informasi. Akhirnya juga berimplikasi kepada tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh perempuan atau laki-laki dan yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan atau laki-laki sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebahagian kelompok masyarakat yang sangat kaku membatasi

peran yang pantas dilakukan baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki, misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur mencampuri urusan masak memasak atau menggendong anaknya didepan umum atau tabu bagi seorang perempuan yang sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebahagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan perempuan dan laki-laki melakukan aktifitas yang sama sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik keatas atap rumah, bekerja kasar memperbaiki jalanan dan jembatan, memanjat pohon kelapa, atau pergi bekerja di sawah, mencangkul dan menanam padi, sedangkan laki-laki sebahagian hanya melakukan aktifitas menyabung ayam dan berjudi.

Dengan menerapkan model pendekatan pemberdayaan perempuan di daerah pesisir melalui sebuah pendekatan sosial, ekonomi, serta pendekatan lingkungan diharapkan perempuan kurang sejahtera mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan sosial – ekonomi dapat diketahui faktor-faktor sosial - ekonomi yang mendukung perubahan. Dengan pendekatan sosial - ekonomi diharapkan perempuan di daerah pesisir dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha ekonomi produktif (UEP) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan pendekatan lingkungan, perempuan diharap mampu menjaga sekaligus melestarikan lingkungannya melalui penyadaran untuk masa depan generasi berikutnya.

Sebenarnya yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah keinginan membentuk individu atau masyarakat menjadi mandiri, yang meliputi kemandirian dalam hal berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang telah

mereka lakukan. Masyarakat dikatakan mandiri apabila suatu kondisi yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengetahuan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku seseorang atau masyarakat yang terbentuk, yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi efektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki seseorang atau masyarakat sebagai upaya pendukung dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses tidaklah harus selamanya ada. Bila mana seseorang atau masyarakat dianggap tidak membutuhkan lagi maka seketika itu proses pemberdayaan dihentikan, itu artinya bahwa seseorang atau masyarakat dianggap sudah mampu mandiri secara sosial - ekonomi. Adapun tahapan-tahapan pemberdayaan yang harus dilalui meliputi tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku, tahap transformasi berupa wawasan kemampuan,

kecakapan, keterampilan sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

### **C . Beberapa Regulasi dalam Pemberdayaan Perempuan**

Sebagai kewajiban dan tanggung jawab kelangsungan hidup lanjut Usia, secara khusus pemerintah telah membuat UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, akan tetapi Undang – Undang Ini tidak secara detail mengatur tentang program yang menyangkut berbagai kehidupan Lanjut Usia. Seiring dengan Kewajiban dan tanggung jawab tersebut, pemerintah juga telah membuat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang ini fokus pada program pemberdayaan masyarakat. UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang – Undang yang ketiga ini jangkauannya lebih luas, meliputi seluruh masyarakat utamanya Perempuan Lanjut Usia dan kelompok masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan.

Khusus Dibidang pelayanan kesehatan, pemerintah telah membuat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 138 dalam Undang – Undang Ini secara tegas disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi perempuan di daerah pesisir harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok perempuan untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Perlu disadari bahwa Perempuan memiliki hak yang dijamin oleh negara seperti hak untuk mendapatkan (1) pelayanan keagamaan, (2) pelayanan kesehatan, (3) pelayanan pendidikan, (4) mendapat kemudahan dalam menggunakan fasilitas, (5) kemudahan dalam layanan bantuan hukum, (6) perlindungan sosial dan (7) bantuan sosial.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial).

Perlindungan sosial yang dimaksud dalam UU Nomor 13 tahun 1998 adalah upaya pemerintah dan atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya yang wajar.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum. (UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial).

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Jminan sosial Nasional). Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya

terpenuhi. Jaminan sosial juga ditujukan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya, diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan (UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial).

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar seseorang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Semua hak – hak perempuan diatas diramu dalam sebuah model pemberdayaan dengan berbagai program dan melibatkan seluruh kemampuan pemerintah baik dipusat maupun daerah.

#### **D . Kajian Hasil Penelitian Sebelumnya**

Aktifitas kaum Perempuan di daerah pesisir sudah banyak diteliti oleh beberapa orang di lokasi yang berbeda, pada umumnya menyoroti keterlibatan mereka pada aspek budidaya rumput laut, diantaranya :

Eko Ariwidodo – Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Rumput Laut Di Bluto Kabupaten Sumenep (2016). Penelitian ini banyak menyoroti tentang pembagian kerja antara suami dan istri nelayan, menganalisa dan kontrol terhadap sumber daya produksi serta menganalisa besarnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan rumput laut, dengan menggunakan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam hal budidaya rumput laut hampir seimbang, mulai dari persiapan rakit, penanaman, perawatan tanaman, pemanenan, perawatan rakit, dan pemasaran. Semua pekerjaan tersebut dilakukan oleh kaum perempuan dan laki-laki secara bersama dan seimbang, kecuali dalam hal pemasaran yang dominan adalah kaum laki-laki.

Nurlaili dan Fatriyandi Nur Priyatna melakukan penelitian mengenai Etos Kerja Perempuan Di Sektor Perikanan Pada Kawasan Masterplan Percepatan Dan



Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Dan Strategi Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi (Studi kasus Perempuan Pembudidaya Rumput Laut di Nusa Penida, Bali 2014), dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan wawancara dan pengamatan. Pekerjaan budidaya rumput laut lebih dominan dikerjakan oleh kaum perempuan, mulai dari tahap persiapan, produksi, dan pasca produksi. Penelitian ini juga menekankan pada etos kerja Perempuan Bali yang bertumpu pada kebudayaan dan tradisi mereka yang biasa disebut dengan Tri Hita Karana, yaitu rajin penuh semangat pantang menyerah, memiliki kebersamaan dan memiliki kemauan untuk maju.

Rosmawati, La Rianda dan St. Aida Adha Taridala (2015) meneliti Peran Jender Dalam Rumah Tangga Petani Rumput Laut Di Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan Harvard Analytical Framework (HAF). Penelitian ini menekankan pada pembagian kerja jender utamanya dalam aktifitas produksi, reproduksi dan sosial serta akses dan kontrol yang dimiliki suami dan istri atas beberapa sumber daya. Pembagian tugas antara suami dan istri pada tiga (3) komponen yaitu Produktif (usaha rumput laut) lebih banyak dikerjakan secara bersama, Reproduksi (kerumahtanggaan) lebih banyak dikerjakan oleh istri, sementara komponen sosial banyak dilakukan secara bersama antara suami dan istri.

Warnika Febri Astanty dan Andi Adri Arief (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Peran Kapasitas Budidaya Rumput Laut (EUCHEUMA COTTONII) Di Kabupaten Takalar dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Peran perempuan pada pengelolaan budidaya rumput laut ini lebih banyak dilakukan di darat seperti mengikat bibit dan menjemur tali bentangan.

Pekerjaan tersebut dianggap suatu pekerjaan yang ringan, sementara pekerjaan berat seperti teknologi budidaya, pemilihan lokasi, pemeliharaan, panen merupakan tanggung jawab kaum laki-laki.

Dari keempat penelitian diatas semuanya menyoroti aktifitas peran perempuan secara umum dalam budidaya rumput laut ditinjau dari sudut pembagian kerja berdasarkan gender dengan berbagai karakteristik daerah masing-masing. Perempuan di Sumenep, Bali dan Buton, peran perempuan dalam aktifitas budidaya rumput laut hampir seimbang bahkan dominan dari peran yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami), sementara di daerah Takalar peran perempuan hanya pada kegiatan yang ringan dan dilakukan di darat seperti mengikat bibit rumput laut. Demikian pula penggunaan metode penelitian berbeda-beda. Penelitian Eko Ariwidodo di Sumenep dan Warnika Febri Astanty dan Andi Ardi Arief di Takalar keduanya menggunakan metode kualitatif dipadukan dengan metode kuantitatif. Nurlaili dan Fatriyandi Nur Priyatna menggunakan metode kualitatif. Sementara Rosmawati dkk (2015) di Buton Utara menggunakan metode Harvard Analytical Framework (HAF).

Penelitian diatas memberi gambaran bahwa kaum Perempuan merupakan salah satu aspek ekonomi dari usaha budidaya rumput laut, disamping aspek ekonomi yang lain seperti angin, musim, lingkungan, teknologi, pasar dan lain-lain. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh seratus persen kaum Perempuan seperti mengikat bibit rumput laut. Tidak berarti bahwa mengikat bibit rumput laut tidak boleh dilakukan oleh kaum Laki-laki, akan tetapi sepanjang pengamatan penulis belum pernah melihat kaum laki-laki di beberapa daerah seperti Bantaeng, Takalar, Bone, yang ikut terlibat melakukan pekerjaan pergi ke laut sendiri atau

bersama suami. Mungkin secara umum pekerjaan tersebut oleh kaum Laki-laki dianggap kurang tepat, pekerjaan yang membosankan, tidak menarik, membutuhkan kesabaran dan ketekunan tersendiri, atau mungkin karena rasa hormat dan kasih sayang terhadap kaum perempuan. Bila kaum Perempuan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan mengikat bibit rumput laut maka akan berpengaruh terhadap hasil produksi.

Penulis mencoba melakukan sebuah penelitian yang dianggap baru dan belum pernah diteliti sebelumnya yaitu Pemberdayaan Sosial – Ekonomi Perempuan di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan observasi mendalam. Peran perempuan dalam budidaya rumput laut sepanjang pengamatan penulis di lapangan hanya sebatas pekerjaan dilakukan di darat mengikat bibit rumput laut. Adapun pekerjaan yang berat seperti ke laut melakukan pembersihan, memperbaiki tali bentangan yang putus, mengontrol perkembangan bibit, dan panen sepenuhnya ditangani oleh kaum laki-laki. Penulis belum pernah dijumpai seorang perempuan pergi ke laut menggunakan perahu mendayung sendiri atau bersama suaminya menangkap ikan atau memanen bibit rumput laut. Kaum perempuan lebih senang memilih aktivitas di darat dari pada pergi ke laut. Pembagian pekerjaan seperti ini lebih didasari pada penghormatan dan rasa kasih sayang kepada kaum perempuan.

Kebiasaan kaum perempuan yang hanya bekerja di darat dengan pekerjaan yang ringan pada umumnya berlaku di daerah Sulawesi Selatan, ini merupakan sebuah penghargaan dan penghormatan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang berada di daerah pesisir, jika dibanding dengan pekerjaan kaum perempuan

di daerah pesisir Jawa, Sumenep, Madura, Bali, dan Buton dimana kaum perempuan turut terlibat bersama suami ke laut mengontrol dan membersihkan rumput laut, walaupun diakui bahwa porsi mereka tentu berbeda-beda sesuai kebiasaan masyarakat setempat, kenyataannya porsi kaum laki-laki jauh lebih besar. Dengan demikian budaya yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat turut berpengaruh terhadap proses budi daya rumput laut.

**Tabel 1:**  
**Penelitian terdahulu**  
**Dari sudut persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang.**

No	Nama	Tempat penelitian	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
01	Eko Ariwidodo	Bluto Kabupaten Sumenep	Kontribusi pekerja perempuan pesisir sektor rumput laut	Gabungan kualitatif dan kuantitatif	Pembagian kerja perempuan dan laki-laki pada budidaya R.L seimbang
02	Nurlaili, Fatriyandi Nur Priyatna	Nusa penida, Bali	Etos kerja perempuan di sektor perikanan	Kualitatif	Etos kerja orang Perempuan Bali (TRI HITA KARANA) sangat mendukung perempuan dalam melakukan aktifitas diluar rumah
03	Rosmawati, La Rianda St. Aida Adha Taridala	Kabupaten Buton Utara	Peran jender dlm Rumah Tangga petani R. Laut	Harvard Analytical Framework (HAF)	Tiga Komponen (Produktif, Refproduksi, Sosial), Produtif dikerjakan secara bersama, Refroduksi lebih banyak dikerjakan istri, dan Sosial dilakukan bersama.
04	Warnika Febri	Kab. Takalar	Analisa peran	Kualitatif dan	Peran

	Astanty, Andi Adri Arief		kapasitas budidaya R. Laut	kuantitatif	perempuan dlm budidaya R. Laut lebih banyak dilakukan di darat
05	Rosalia Indriyati Saptatiningsih	Kec. Turi Kab. Sleman	Pemberdayaan perempuan desa untuk mengurangi kemiskinan	Observasi partisipasi Dokumentasi Wawancara mendalam	Bahwa pemberdayaan perempuan dpt menumbuhkan kesadaran dirinya sebagai manusia seutuhnya dan posisi dlm budayanya
06	Saddakati Andi Arsyad	Kab. Luwu	Pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan di daerah pesisir	Kualitatif	Keberhasilan Program Pemerintah dalam pemberdayaan (UEP), UPK : UEP dan SPP. Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri

Sumber data : Diolah sendiri

Secara khusus fokus lokasi penelitian berada di “daerah pesisir Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu”. Di Desa Senga Selatan terdapat enam (6) dusun, tetapi hanya empat (4) Dusun yaitu Dusun Taddette, Dusun Walenna Timur, Walenna Barat dan Dusun Kampung Baru dimana sebahagian besar masyarakatnya melakukan aktifitas budidaya rumput laut. Disamping itu penulisan juga menyorot dari sisi mentalitas perempuan di daerah pesisir itu sendiri yang bertumpu pada pilosofi “Pakkareso dan Matinulu” (pekerja

keras dan ulet). Sebuah mentalitas perempuan Desa yang senang bekerja diluar rumah, selalu hidup mandiri tidak mau tergantung kepada orang lain. Biasanya mereka merasa gelisah dan hidupnya tidak begairah, bersemangat dan loyo kalau mereka dilarang beraktifitas diluar rumah. Bila mereka diajak ke kota cenderung tidak berselera dengan berbagai alasan yang mereka buat-buat sendiri. Sebenarnya alasan tersebut juga masuk akal seperti kalau pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama maka tidak ada lagi yang memelihara dan menjaga ternak ayamnya, tidak ada lagi yang membersihkan rumput di kebunnya dan lain sebagainya alasan yang dibuat-buat agar mereka tidak meninggalkan kampung halamannya. Bila seseorang anak memaksakan untuk pergi maka dia cenderung untuk menuruti, akan tetapi di rumah barunya di Kota selalu merasa gelisah dan mengingat kampung halamannya. Akhirnya dia mengatakan kepada anaknya aku ingin kembali ke kampung halamn karena tinggal di kota hanya mempercepat kematianku. Begitulah kira-kira gambaran seorang perempuan desa yang selalu hidup dengan kondisi alam serba terbuka dengan mental Pakkareso na matinulu.

Mentalitas pakkareso bagi kaum perempuan adalah sebuah mental pembentuk karakter disiplin diri dalam bekerja. Hampir setiap hari perempuan desa lebih duluan bangun dari suaminya. Setelah sholat subuh dan menyiapkan makanan pagi untuk suami, apalagi kalau perempuan yang sudah berstatus janda mereka keluar dari rumah pergi ke kebun yang tidak jauh dari tempat tinggal membersihkan tanaman yang dipenuhi gulma. Mereka ke kebun biasa membawa parang atau bahkan membawa tangki semprot. Demikian pekerjaan itu hampir setiap hari dilakukan oleh pada umumnya perempuan setengah baya. Bagi perempuan yang tidak memiliki kebun dekat rumah, biasanya mereka tetap keluar

setiap pagi untuk mencari pekerjaan seperti mengikat bibit rumput laut, atau menjaga toko dan menjahit.

Potret perempuan pakkareso di Senga Selatan terkait dengan beragam isu, tidak hanya aspek ekonomi semata, misalnya pada studi ekonomi pembangunan, isu pekerja perempuan pakkareso banyak dikaitkan dengan isu kesejahteraan anak, sebagaimana yang diungkap oleh Joanne Leslie dan Michael Paolisso, (1989, 4) “mayoritas perempuan dalam usia produktif entah di Negara industrialisasi dan Negara berkembang. Pekerja perempuan menghadapi masalah dalam menyelaraskan aktivitas ekonomi produktif mereka dengan perawatan anak”,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A . Type Penelitian**

Penelitian ini bertipe deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tidak berarti bahwa angka-angka diabaikan, akan tetapi angka-angka digunakan hanya sekedar lebih memperjelas, sebagai pemberi keterangan tambahan sebuah argumentasi. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki garis pantai 3 km dengan aktivitas penduduk perempuan paling banyak sebagai pengikat bibit rumput laut. Disamping wilayah kecil ini juga memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yaitu 25,82 %. Pekerjaan masyarakat sebagai nelayan budidaya rumput laut turut menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan yang tinggal di daerah pesisir. Terdapat enam puluh lima (65) Nelayan pembudidaya rumput laut tersebar pada empat (4) Dusun yaitu Dusun Taddette, Walenna Timur, Walenna Barat, dan Kabulawang, sementara masyarakat di dua Dusun lainnya pada umumnya sebagai petani sawah atau kebun. Jumlah nelayan budidaya rumput laut tidak tersebar merata, yang paling banyak adalah Dusun Taddette empat puluh empat (44) Nelayan, di Dusun Walenna Timur terdapat sepuluh (10), Dusun Walenna Barat terdapat tujuh (7) Nelayan dan di Dusun Labulawang empat (4) Nelayan. Perempuan di empat dusun inilah menjadi fokus pengamatan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dua (2) nelayan pembudidaya rumput laut yang terdapat di Dusun Taddette (yang